

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi internal auditor mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan keberadaan internal auditor diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi suatu pemerintahan ataupun dalam suatu perusahaan sebagai fungsi yang independen menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya, sehingga mendorong pihak terkait melakukan pengkajian terhadap profesi ini. Peran auditor pemerintah kini semakin penting, terutama dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional negara maupun daerah. Mulyadi (2005) menjelaskan bahwa auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah dimana tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Dengan begitu auditor adalah pegawai negeri yang bertugas melakukan audit.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pimpinan dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi dasar manajemen lainnya, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur, sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun, karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip

organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya atau bawahannya yang mengikuti alur atau struktur organisasi.

Banyak tuntutan publik agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas, agar tetap solid maka perlu diciptakan suatu kondisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, kondisi ini disebut dengan *good government governance*. Tata kelola yang baik diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi no 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga pemerintahan mempunyai tugas melakukan yang terbaik.

Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good government governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good government governance*, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Sehingga dalam prakteknya, konsep *good government governance* harus ada dukungan komitmen dari semua pihak.

Kebutuhan terhadap penerapan *good governance* atau tata kelola yang baik di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak Indonesia merdeka. Namun, tekanan pentingnya penerapan *good governance* semakin meningkat sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997. Krisis tersebut terjadi antara lain disebabkan baik sektor publik maupun sektor swasta belum menerapkan *good governance* secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika pengelola pemerintahan maupun etika bisnis.

Good governance dapat dikatakan sebagai salah satu pilar dalam suatu sistem perekonomian. *Good governance* terkait erat dengan kepercayaan baik

terhadap penyelenggaraan negara dan iklim usaha di suatu negara maupun terhadap para pelaku usaha. Untuk membereskan akar masalah dari bangsa ini pendekatan efektif yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *good governance* sebagai salah satu pilar membangkitkan kembali bangsa ini sebagai bangsa yang bermartabat. Sejak tahun 1998, Indonesia melakukan kerja sama dengan UNDP, yaitu program untuk lebih memberdayakan *governance* dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Program tersebut dikenal dengan “*partnership to Support Governance Reform In Indonesia*” dari UNDP, *World Bank*, dan *Asian Development Bank* (ADB). Melalui program inilah “*good governance*” menjadi semakin populer di Indonesia.

Good government governance diterapkan untuk berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan pemerintahan dan tujuan masyarakat. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good government governance* diharapkan dapat memperbaiki kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Salah satu fungsi dari pemerintahan adalah fungsi pelayanan masyarakat. Kinerja pemerintah yang optimal pada akhirnya harus dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan ini menjadi salah satu landasan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada (Pratolo, 2012).

Kinerja pemerintah atau organisasi dibutuhkan dalam mengukur tingkat kepuasan yang diberikan kepada publik. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2002).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. Pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan. Ukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan yang disediakan tersebut.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Inspektorat kabupaten/kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantuan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau *good government governance*.

Tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat salah satunya dari kasus yang ada di daerah tersebut dan bagaimana daerah tersebut menangani kasus yang ada, seperti kasus tentang korupsi. Seperti yang dilansir oleh infokorupsi.com bahwa di daerah-daerah banyak terjadi korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati, mantan kepala dinas maupun mantan kepala desa dan staf-staf yang

dinaunginya. Salah satunya adalah kasus mantan bupati yang rumahnya dilelang Kejaksaan Negeri karena tersangkut dua kasus korupsi dan kasus mantan kepala desa yang diduga korupsi uang kas desa sebesar ratusan juta rupiah

Dengan adanya pengawasan yang baik dan tata kelola yang baik akan memberikan nilai tambah kepada organisasi khususnya dalam kinerja organisasi. Masalah yang kemudian timbul berkaitan dengan pengaruh internal audit adalah pengaruh internal audit dalam memberikan nilai tambah (*value added*) dengan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kinerja suatu organisasi tersebut.

Seperti yang diteliti oleh Amaliyah yang berjudul “Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan *good government governance* Pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian Amaliyah adalah peranan inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good government governance* dan Inspektorat berperan penting terhadap penerapan *good government governance* pada instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian pengembangan dari penelitian Kurniati yang berjudul “Analisis Peranan Internal Audit sebagai Implementasi *Good Corporate Governance* dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus pada PT.”X””. hasil dari penelitian Kurniati adalah internal auditor telah berperan secara efektif dalam implementasi *good corporate governance* dan penurunan kinerja perusahaan menunjukkan *good corporate governance* hanya diimplementasikan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian tersebut karena masalah *good corporate governance* menjadi perbincangan manakala menyangkut tentang tata

kelola yang baik bagi perusahaan, akan tetapi peneliti ingin mengembangkan atau mengubahnya ke dalam sektor publik yaitu membahas tentang *good government governance* yang menjadi topik di pemerintahan.

Penelitian lain yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah penelitian dari Pratolo yang berjudul peran *good government governance* untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah dan kepuasan masyarakat di era otonomi daerah dalam menghadapi tantangan global, peneliti Astuti yang berjudul peran internal audit dan komite audit dalam mewujudkan *good corporate governance*, peneliti Amaliyah yang berjudul peranan inspektorat terhadap penerapan *good government governance* pada instansi pemerintahan provinsi sulawesi selatan, dan Ghozali yang berjudul dampak penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

1.2 Rerumusan Masalah

1. Apakah keberadaan auditor internal berpengaruh dalam penciptaan prinsip-prinsip *good goverment governance* pada Instansi Pemerintahan?
2. Apakah keberadaan auditor internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan?
3. Apakah penciptaan prinsip-prinsip *good goverment governance* berpengaruh terhadap kinerja Instansi Pemerintahan?
4. Apakah keberadaan auditor internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan dengan prinsip-prinsip *good government governance* sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan auditor internal dalam penciptaan pelaksanaan prinsip-prinsip *good government governance* pada instansi pemerintahan.
2. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan auditor internal terhadap kinerja instansi pemerintahan.
3. Untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kinerja instansi pemerintahan.
4. Untuk mengetahui pengaruh keberadaan auditor internal dan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kinerja instansi pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat dan Auditor Internal

Memberikan tambahan informasi dan masukan tentang pentingnya auditor internal dalam penciptaan prinsip-prinsip *good government governance* terhadap kinerja instansi pemerintahan, agar dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintahan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan Memberikan masukan dan manfaat bagi penciptaan prinsip-prinsip *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Bagi Peneliti Lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang akuntansi sektor publik.